

DAFTAR PUSTAKA

Literatur :

Dumairi, *Kontribusi Investasi Mendongkrak Perekonomian Indonesia*, (Semarang : Pustaka Print, 2007).

Head, John, *Pengantar Umum Hukum Ekonomi : Seri Dasar-Dasar Hukum Ekonomi 1*, (Jakarta: Program Kerja Sama antara Proyek ELIPS dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1997).

Nagy, Pancras J., *Country Risk, How to Asses, Quantify and Monitor*, (London: *Economy Publication*, 1979).

Pramono, Nindyo, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, (Bandung : Aditya Bakti, 2006).

Rajagukguk, Erman (a), *Hukum Investasi di Indonesia : Pokok Bahasan*, (Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006).

Samadani, H.U. Adil, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2013).

Siregar, Mahmut. *Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta : Erlangga 2005).

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, (Jakarta : 1984).

Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : 2005, Raja Grafindo Persada).

Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan.

Pemerintah Nomor 76 dan 77 tentang Daftar Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Walikota tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perwal Nomor 83 Tahun 2014.

Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 57/SK.2004 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal.

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Surat Edaran Mendagri Nomor 500/1191/V/BANGDA tentang Penyempurnaan Panduan Nasional dan Pedoman Penyelenggaraan PTSP.

Dokumen :

Doing Business 2014 adalah laporan tahunan yang dilakukan oleh *International Finance Corporation* dari *World Bank Group* yang melakukan survei terhadap peraturan yang mendukung serta menghambat aktivitas bisnis di 189 negara di dunia.

Frida Rustiani, Izin : Mampukah Melindungi Masyarakat dan Seharusnya Beban Siapa?, (Makalah disampaikan dalam Konferensi PEG USAID tentang Desentralisasi, Reformasi Kebijakan dan Iklim Usaha di Hotel Aryaduta, Jakarta 12 Agustus 2003).

Hasil Studi *Sub National Doing Business*, Tahun 2012, “Waktu mengurus perizinan di Yogyakarta lebih cepat 3 hari dibanding rata-rata di kota lainnya yang disurvei di Indonesia.

Indonesia-Netherlands Association, Indonesian-Benelux Chamber of Commerce, Peraturan Daerah Ramah Investasi Panduan Penyusunan dan Review (Dilengkapi Contoh-Contoh Perda Investasi Terkait), Jakarta :Indonesia-Netherlands Association, 2008.

Laporan Perizinan pada Kegiatan Pengolahan Data Pelaporan Perizinan Kota Tangerang Tahun 2013.

World Economic Forum 2007, The Global Competitiveness Report 2013-2014, Jenewa :World Economic Forum.

Jurnal :

Agung Nusantara dan Enny Puji Astutik. *Analisis Peranan Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, Jurnal Bisnis dan Ekonomi (September 2001).

Camelia Malik, *Jaminan Kepastian Hukum dan Kegiatan Penanaman Modal di Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis (Volume 26, Nomor 4, Tahun 2007).

Tulus Tambunan, “*Kendala Perizinan dalam Kegiatan Penanaman Modal di Indonesia dan Upaya Perbaikan yang Perlu Dilakukan Pemerintah.*”, Jurnal Hukum Bisnis Indonesia (Volume 26 Nomor 4 Tahun 2007).

Tulus Tambunan, *Kendala Perizinan dalam Kegiatan Penanaman Modal di Indonesia dan Upaya Perbaikan yang Perlu Dilakukan Pemerintah*, Jurnal Hukum Bisnis (Volume 26, Nomor 4, Tahun 2009)

Wiranata S, *Basis Perekonomian Dalam Pembangunan Wilayah di Era Otonomi Daerah*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, XII (I) 2005.

Yulianto Syahyu, *Pertumbuhan Investasi Asing di Kepulauan Batam : Antara Dualisme Kepemimpinan dan Ketidakpastian Hukum*, Jurnal Hukum Bisnis (Volume 22, Nomor 5, Tahun 2003).

Media Internet :

<http://perpustakaan-online.blogspot.com> 30 September 2015, Pukul 14.21 WIB.